



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PG.KP.02.01/ 02 /I-2019

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Ombudsman RI, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi Jabatan tersebut, dengan ketentuan :

A. Jabatan yang akan diisi

1. Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis (Eselon II.a)
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (Eselon II.a)
3. Inspektur (Eselon II.a)

B. Persyaratan Administrasi

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b)
3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun
4. Sedang/pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III)/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 31 Januari 2019;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 / D-IV;
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2016 dan tahun 2017;
8. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) / Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
9. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik;
12. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
13. Memiliki kompetensi, kepemimpinan, dan integritas yang dibutuhkan;
14. Sehat jasmani dan kejiwaan/rohani;
15. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
16. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun 2016 dan Tahun 2017;
17. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia;
18. Mampu bekerja sama dan bersosialisasi dengan tim dengan berbagai macam kultur; dan
19. Memiliki etos kerja dan mampu bekerja di bawah tekanan.

C. Lamaran dan Kelengkapan Dokumen

Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Lamaran yang ditandatangani pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,-
2. Daftar Riwayat Hidup yang memuat data pribadi, pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan, nomor HP, alamat email;
3. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bermeterai Rp. 6.000,-;
4. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana, serta hukuman disiplin tingkat sedang, atau tingkat berat yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,-;
5. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik dan bermeterai Rp. 6.000,-;
6. Pakta Integritas yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,-;
7. Fotokopi Ijazah S-1 (S-2 dan/atau S-3 jika ada);
8. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Pangkat Terakhir min. Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b);
9. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional dalam Jabatan Terakhir;
10. Fotokopi sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III) dan/atau Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2016 dan Tahun 2017;
12. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, yang terdiri atas:
 - a. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - b. Surat Keterangan Sehat Kejiwaan/Rohani dari Dokter Spesialis; dan
 - c. Surat Keterangan Bebas Narkoba (**dapat menyusul pada saat Assessment**).
13. Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
14. Fotokopi NPWP;
15. Fotokopi bukti penyerahan SPT Tahun 2016 dan Tahun 2017;
16. Fotokopi laporan penyerahan LHKASN/LHKPN;
17. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

D. Pendaftaran

Masa pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Januari 2019 dan pengumuman dapat dilihat juga pada laman Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

1. Pelamar mengirimkan lamaran beserta dokumen kelengkapannya selambatnya kami terima pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 16.00 WIB yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat :

**PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
email : panseljpt@ombudsman.go.id Telp : 021-52960907

Softcopy lamaran dan dokumen kelengkapan dikirimkan melalui email panseljpt@ombudsman.go.id

2. Seluruh dokumen administrasi yang disampaikan menjadi hak milik Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia.
3. Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan langsung kepada peserta yang lulus tahapan seleksi dan/atau melalui *website* Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

E. Jadwal Tentatif Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman pendaftaran	Mulai 26 November 2018
2.	Penerimaan lamaran	Sampai dengan 31 Januari 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	6 Februari 2019
4.	Ujian Makalah	12 Februari 2019
5.	Pengumuman hasil ujian makalah	14 Februari 2019
6.	Assessment	21 - 22 Februari 2019
7.	Presentasi dan wawancara akhir	19 - 20 Maret 2019
8.	Pengumuman hasil akhir seleksi	27 Maret 2019

F. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.
 - a. Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. Selanjutnya panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
2. Seleksi Pembuatan Makalah.
 - a. Pembuatan makalah dan paparan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Selanjutnya Sekretariat Panitia Seleksi akan menyampaikan hasil pembuatan makalah kepada Panitia Seleksi dan mengumumkan hasilnya di website Ombudsman.
3. *Assessment Center*.
 - a. Penilaian menggunakan metode *Assessment Center* (tertulis, diskusi, dan wawancara) dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Selanjutnya panitia menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus seleksi Asesmen, untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
4. Seleksi Wawancara dan Presentasi.
 - a. Panitia Seleksi akan melakukan wawancara akhir dan presentasi terhadap peserta yang lulus seleksi pembuatan makalah, dan dapat mengundang *user* sesuai jabatan;
 - b. Selanjutnya ketua panel menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Ombudsman Republik Indonesia.

Seluruh hasil pelaksanaan tahapan seleksi akan diumumkan langsung kepada peserta yang lulus dengan tahapan seleksi dan/atau melalui website Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

G. Deskripsi Tugas Jabatan

1. Kepala Biro Fasilitas Pelayanan Teknis

Kepala Biro Fasilitas Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas pelayanan teknis pengawasan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Fasilitas Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan fasilitas pemeriksaan khusus, resolusi dan pemantauan laporan masyarakat.
- b. Koordinasi dan fasilitas pengendalian mutu dan pengelolaan laporan masyarakat.
- c. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengawasan pelayanan publik.
- d. Pelaporan pengawasan pelayanan publik.
- e. Pelaksanaan administrasi biro.

2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat dan pengelolaan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat.
- b. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi.
- c. Pengelolaan data dan layanan kepustakaan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan teknologi informasi.
- e. Pelaksanaan administrasi biro.

3. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.
- d. Pelaksanaan pengawasan lainnya atas penugasan Sekretaris Jenderal.
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

H. Ketentuan Lain-lain

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama proses seleksi ditanggung oleh peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia berhak membatalkan hasil seleksi.

Catatan:

Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui website Ombudsman RI www.ombudsman.go.id, untuk itu para peserta seleksi agar aktif mengakses website dimaksud. Kelalaian karena tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggungjawab peserta.

Jakarta, 17 Januari 2019

Ketua Panitia Seleksi,



Ahmad Alamsyah Saragih, S.E.